

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa. Menurut Suharyani & Djumarno (2023) SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan bentuk komitmen bersama baik di tingkat global maupun nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan strategis memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencapaian SDGs, karena berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut. SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa adalah program yang diadaptasi dari SDGs yang dicanangkan oleh PBB dan terdiri dari 17 Tujuan utama. Dengan menerapkan SDGs Desa dalam pembangunan, hal ini dapat mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan upaya pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara terus-menerus, mempertahankan keberlangsungan kehidupan sosial, menjaga kelestarian lingkungan hidup serta, memastikan keadilan dan tata kelola yang baik agar kualitas hidup dapat terus meningkat dari generasi ke generasi.

Menurut Suharyani & Djumarno (2023) Pembangunan berkelanjutan merupakan sebagai upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang

mendukung kehidupannya. Saat ini, isu pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik yang krusial dan perlu terus disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu agenda global yang diadopsi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kepentingan generasi di masa depan. Di Indonesia, desa memiliki peran strategis dalam mencapai Pembangunan berkelanjutan melalui berbagai aspek pengelolaan sumber daya, salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mengacu pada empat prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta ketertiban dan kedisiplinan dalam penganggaran. Pengelolaan merupakan serangkaian aktivitas atau upaya yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk melaksanakan berbagai tugas demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sunarti et al., (2018) Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada hak asal-usul dan kewenangan lokal di tingkat desa yang dananya bersumber dari APBDes. Selain itu, pelaksanaan kewenangan tersebut juga dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. pengelolaan keuangan desa meliputi; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat tujuan pembangunan

berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), terutama pada indikator desa tanpa kemiskinan (SDGs 01) dan infrastruktur desa sesuai kebutuhan (SDGs 09). Hal ini juga terlihat pada kondisi di Desa Banyoneng Laok, yang menjadi fokus penelitian ini.

Pemilihan Desa Banyoneng Laok sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, desa ini merupakan salah satu desa yang aktif dalam pemanfaatan dana desa, tetapi tetap menghadapi persoalan dalam hal ketepatan sasaran program bantuan dan ketimpangan pembangunan infrastruktur. Kedua, mayoritas penduduknya merupakan pekerja migran dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa. Ketiga, pemerintah desa menunjukkan keterbukaan terhadap kegiatan penelitian serta kemudahan akses data, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis awal yang terangkum dalam Tabel 1.1, ditemukan sejumlah permasalahan yang tersebar di setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu:

Tabel 1.2 Hasil Studi Pendahuluan

No	Aspek Pengelolaan	Permasalahan Utama	Implikasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
1	Perencanaan	Musyawarah Desa belum melibatkan semua lapisan masyarakat secara optimal	Aspirasi masyarakat kurang terakomodasi
2	Penganggaran	Prioritas penggunaan dana masih belum seimbang antara bantuan dan pembangunan	Infrastruktur belum berkembang merata

3 Pelaksanaan	Penyaluran BLT tidak tepat sasaran, kurang verifikasi penerima	Keadilan sosial belum tercapai
4 Penatausahaan	Masih ditemukan kesalahan administrasi dalam pencatatan transaksi	Transparansi dan akuntabilitas rendah
5 Pelaporan & Pertanggungjawaban	Laporan realisasi keuangan belum selalu tepat waktu	Hambatan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan

Tabel 1.1 menunjukkan berbagai permasalahan dalam aspek pengelolaan keuangan desa di Desa Banyoneng Laok yang berdampak langsung terhadap terhambatnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Permasalahan dimulai dari tahap perencanaan yang belum partisipatif secara menyeluruh, sehingga kebutuhan riil masyarakat tidak sepenuhnya terakomodasi. Pada tahap penganggaran, dana lebih banyak difokuskan pada bantuan sosial, sementara aspek pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat masih kurang diperhatikan. Permasalahan juga muncul dalam pelaksanaan, terutama dalam penyaluran BLT yang tidak tepat sasaran. Sementara itu, dari sisi penatausahaan, masih ditemukan ketidaktertiban administrasi yang berpotensi mengganggu akuntabilitas. Akhirnya, dalam pelaporan dan pertanggungjawaban, masih terdapat keterlambatan yang berdampak pada proses evaluasi dan transparansi. Permasalahan-permasalahan ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya mendukung pencapaian pembangunan desa yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Desa (Studi pada Desa Banyoneng Laok)”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Banyoneng Laok berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan khususnya terkait SDGs Desa 01: Desa Tanpa Kemiskinan, dan SDGs Desa 09: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- Untuk mengetahui kontribusi pengelolaan keuangan desa di desa Banyoneng Laok terkait pembangunan berkelanjutan khususnya terkait SDGs Desa 01: Desa Tanpa Kemiskinan, dan SDGs Desa 09: Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi akademis mengenai pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan, serta memberikan data empiris untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat penelitian bagi masyarakat Desa

Untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat dari pengelolaan Pembangunan berkelanjutan khususnya peningkatan layanan publik, infrastruktur, dan program Pembangunan yang lebih efektif.

3. Manfaat penelitian bagi pemerintah desa

Untuk memberikan wawasan dan rekomendasi untuk memperbaiki praktik pengelolaan keuangan desa, sehingga anggaran dapat digunakan secara lebih efektif dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.